

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			5.500.000,00	KECAMATAN TALIABU SELATAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			5.500.000,00	KECAMATAN TALIABU SELATAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			10.500.000,00	KECAMATAN TALIABU SELATAN	
		-	-	-	-	-	-	-	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	85.300.000,00	-	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		5.500.000,00	KECAMATAN TALIABU SELATAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			0,00	KECAMATAN TALIABU SELATAN	
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih tertib, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat]	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	80	50	55	-	-	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60	85.300.000,00	-	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Selatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			5.500.000,00	KECAMATAN TALIABU SELATAN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	2.000.000,00							23.000.000,00		
		-	-	-	-	-	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.000.000,00	-	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-				-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		23.000.000,00	KECAMATAN TALIABU SELATAN	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			23.000.000,00	KECAMATAN TALIABU SELATAN	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								5.710.983.000,00	5.710.983.000,00	5.710.983.000,00	0,00					5.710.983.000,00			
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							5.710.983.000,00	5.710.983.000,00	5.710.983.000,00	0,00							5.710.983.000,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							5.710.983.000,00	5.710.983.000,00	5.710.983.000,00	0,00							5.710.983.000,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	570.823.500,00	570.823.500,00	677.779.500,00	106.956.000,00							677.779.500,00		
		[Terselenggaranya sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpadu, akuntabel, dan berorientasi hasil dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah]	Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	90	55	60	-	-	570.823.500,00	570.823.500,00	677.779.500,00	-	-	-	-	-	-	65	677.779.500,00	-	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	95.840.000,00	95.840.000,00	95.840.000,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		95.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	95.840.000,00	95.840.000,00	95.840.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			95.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	310.165.500,00	310.165.500,00	417.121.500,00	106.956.000,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		417.121.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.494.000,00	50.494.000,00	50.494.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			50.494.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24.698.500,00	24.698.500,00	24.698.500,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			24.698.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			7.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	32.555.000,00	32.555.000,00	32.555.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			32.555.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	195.218.000,00	195.218.000,00	302.174.000,00	106.956.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			302.174.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		21.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			21.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		-	-	-	-	-	-	-	570.823.500,00	570.823.500,00	677.779.500,00	-	-	-	-	-	-	-	677.779.500,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	62.218.000,00	62.218.000,00	62.218.000,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		62.218.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	62.218.000,00	62.218.000,00	62.218.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			62.218.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	1.507.176.500,00	1.507.176.500,00	1.507.176.500,00	0,00							1.507.176.500,00	
		[Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan]	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	75	55	55	-	-	1.507.176.500,00	1.507.176.500,00	1.507.176.500,00	-	-	-	-	-	-	60	1.507.176.500,00	-
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.507.176.500,00	1.507.176.500,00	1.507.176.500,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		1.507.176.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				70 Orang	70 Orang	1.467.176.500,00	1.467.176.500,00	1.467.176.500,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			1.467.176.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	760.983.000,00	760.983.000,00	654.027.000,00	-106.956.000,00							654.027.000,00	
		[Meningkatnya etika dan budaya politik]	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	90	64	65	-	-	760.983.000,00	760.983.000,00	654.027.000,00	-	-	-	-	-	-	65	654.027.000,00	-
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	760.983.000,00	760.983.000,00	654.027.000,00	-106.956.000,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		654.027.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	560.983.000,00	560.983.000,00	560.983.000,00	0,00	Kab. Pulau Taliabu, Taliabu Barat, Bobong	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			560.983.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	93.044.000,00	-106.956.000,00	Kab. Pulau Taliabu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif			93.044.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00							100.000.000,00	
		[Meningkatnya keterliban organisasi kemasyarakatan]	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	75	52	52	-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	55	100.000.000,00	-
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif 5. Transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan responsif	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025					
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>				29 Orang	29 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	2.772.000.000,00	2.772.000.000,00	
		[Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan]	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	80	50	50	-	-	2.772.000.000,00	2.772.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	2.772.000.000,00	2.772.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas									
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	1.092.000.000,00	1.092.000.000,00	

	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	1.680.000.000,00	1.680.000.000,00	
	J U M L A H								516.419.759.000,00	526.274.759.000,00	



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan gambaran tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam melaksanakan urusan pemerintahan, memberikan pelayanan publik, dan mencapai tujuan serta sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan keluaran administratif, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bab ini memuat kerangka pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 yang mencakup indikator kinerja utama daerah, indikator tujuan dan sasaran RPJMD, indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta target yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun. Indikator tersebut menjadi instrumen untuk menilai perkembangan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, infrastruktur, perekonomian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, ketahanan bencana, kehidupan sosial budaya, dan produktivitas sektor maritim.

Penyusunan target kinerja dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi indikator yang telah menunjukkan kemajuan, indikator yang masih mengalami deviasi, serta berbagai permasalahan yang memengaruhi pencapaian target. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar penyesuaian target, program, kegiatan, pendanaan, dan strategi pelaksanaan sampai dengan akhir tahun.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tahap pertama RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 dengan fokus **“Fondasi MUDA: Pemenuhan Layanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan.”** Oleh karena itu, target kinerja diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, pelayanan publik, pemerataan infrastruktur wilayah kepulauan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, pengembangan sektor maritim, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Penetapan indikator dan target kinerja juga menjadi dasar dalam membangun keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab memastikan bahwa program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian indikator pembangunan daerah. Dengan demikian, pencapaian kinerja tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah pengampu, tetapi memerlukan koordinasi lintas sektor, dukungan pemerintah pusat dan provinsi, partisipasi dunia usaha, serta keterlibatan masyarakat.

Melalui pengukuran kinerja yang objektif, konsisten, dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan mengambil langkah korektif secara tepat terhadap indikator yang belum mencapai target. Kerangka kinerja dalam bab ini selanjutnya menjadi acuan dalam pengendalian pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2026, evaluasi hasil pembangunan, serta penyusunan laporan kinerja dan dokumen perencanaan pada periode berikutnya.

Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

Penetapan indikator kinerja makro Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 merupakan bagian penting dalam kerangka pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja makro digunakan untuk menggambarkan perkembangan umum kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Indikator kinerja makro memiliki karakter lintas sektor sehingga pencapaiannya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Keberhasilannya ditentukan oleh keterpaduan program antarsektor, dukungan pemerintah pusat dan Provinsi Maluku Utara, partisipasi pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat. Oleh karena itu, indikator makro menjadi instrumen bersama untuk mengarahkan program, kegiatan, dan pendanaan pada hasil pembangunan yang terukur.

Penetapan target Tahun 2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, RKPD Tahun 2026, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Penetapan target juga mempertimbangkan kondisi awal indikator, perkembangan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku Utara, kemampuan keuangan daerah, karakteristik wilayah kepulauan, ketersediaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta potensi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan jasa.

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, penyesuaian target indikator makro dilakukan apabila terdapat perbedaan antara asumsi pada awal perencanaan dengan perkembangan kondisi aktual. Penyesuaian tidak dimaksudkan untuk mengurangi komitmen pencapaian sasaran pembangunan, tetapi untuk memastikan target tetap realistis, relevan, dapat diukur, dan dapat dicapai sampai dengan akhir tahun. Target yang ditetapkan harus tetap menunjukkan arah perbaikan dibandingkan kondisi awal dan mendukung pencapaian target akhir RPJMD.

Indikator kinerja makro Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Indeks Pembangunan Manusia, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, dan PDRB per kapita. Masing-masing indikator menggambarkan dimensi pembangunan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam membentuk tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan kapasitas produksi barang dan jasa di Kabupaten Pulau Taliabu. Pada Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diarahkan mencapai sekitar **6,00 persen**. Target tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, konstruksi, transportasi, jasa pemerintahan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi sekitar **6,63 persen**. Pencapaiannya diarahkan melalui integrasi perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan produktivitas petani dan nelayan, pengembangan UMKM, serta perbaikan infrastruktur desa dan sentra produksi. Penanganan kemiskinan perlu menggunakan data sosial ekonomi yang akurat agar bantuan dan program pemberdayaan tepat sasaran.

Tingkat Pengangguran Terbuka diarahkan pada kisaran **3,40 persen**. Upaya pencapaiannya dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi, pengembangan kewirausahaan, penguatan koperasi dan UMKM, serta peningkatan keterkaitan antara kebutuhan pasar kerja dan keterampilan tenaga kerja. Pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor unggulan juga diharapkan memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja lokal.

Rasio Gini ditargetkan berada pada kisaran **0,190**. Target tersebut menunjukkan upaya menjaga ketimpangan pengeluaran masyarakat pada tingkat rendah. Kebijakan yang diperlukan mencakup pemerataan pelayanan dasar, peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, pengembangan pusat pertumbuhan di luar Bobong, penguatan konektivitas antarkecamatan, serta pemberdayaan kelompok miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat wilayah terpencil.

Indeks Pembangunan Manusia diarahkan mencapai sekitar **64,00**. Peningkatan IPM dilakukan melalui intervensi terpadu pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kebijakan utama meliputi peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, penurunan stunting dan kematian ibu, peningkatan kualitas pembelajaran, pengurangan angka putus sekolah, serta penguatan produktivitas dan daya beli masyarakat.

Pada dimensi pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah diarahkan mencapai sekitar **8,40 tahun**, sedangkan Harapan Lama Sekolah ditargetkan sebesar **12,90 tahun**. Pencapaian target tersebut membutuhkan peningkatan akses pendidikan, pemerataan guru, rehabilitasi sarana pendidikan, dukungan kepada peserta didik dari keluarga miskin, serta peningkatan kualitas literasi dan numerasi. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pendidikan nonformal dan pelatihan vokasi sesuai potensi ekonomi lokal.

Pada dimensi kesehatan, Usia Harapan Hidup ditargetkan mencapai sekitar **63,60 tahun**. Target tersebut didukung melalui penguatan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak; perbaikan gizi; pengendalian penyakit; serta pemerataan tenaga kesehatan dan obat-obatan. Penguatan RSUD Bobong, puskesmas, puskesmas pembantu, dan posyandu menjadi bagian penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai sekitar **Rp37,80 juta per orang per tahun**. Peningkatan PDRB per kapita diharapkan berasal dari pertumbuhan produksi dan nilai tambah sektor unggulan, hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, penguatan perdagangan dan jasa, serta peningkatan investasi. Namun, peningkatan PDRB per kapita perlu disertai pemerataan pendapatan agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pencapaian indikator kinerja makro dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas fiskal daerah, kualitas aparatur, kondisi infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, ketersediaan data, dan efektivitas koordinasi antarsektor. Faktor eksternal mencakup kebijakan transfer ke daerah, inflasi, harga komoditas, kondisi cuaca dan bencana, akses transportasi laut, serta perkembangan perekonomian nasional dan Provinsi Maluku Utara.

Untuk memastikan pencapaian target, setiap indikator perlu dilengkapi perangkat daerah koordinator, perangkat daerah pendukung, sumber data, metode penghitungan, dan jadwal pemantauan. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan membandingkan realisasi terhadap target, mengidentifikasi penyebab deviasi, dan merumuskan langkah korektif. Indikator yang menunjukkan risiko tidak tercapai perlu memperoleh perhatian melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi, penajaman lokasi intervensi, dan penyesuaian alokasi anggaran.

Dengan demikian, penetapan indikator kinerja makro Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai pencantuman angka target dalam dokumen perencanaan. Indikator tersebut menjadi instrumen pengendalian pembangunan, pengukuran akuntabilitas pemerintah, dan dasar pengambilan kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu secara berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja makro Tahun 2026 memperhatikan target RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, target awal RKPD Tahun 2026, perkembangan kondisi daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026. Penyesuaian target dilakukan untuk menjaga agar sasaran pembangunan tetap realistis, terukur, dan dapat dicapai sampai dengan akhir tahun.

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2026	Perubahan Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,20	6,00
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,50	2,50
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	64,08	64,00
4	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan	Rp ribu/ orang/ tahun	21.957	21.957
5	Tingkat Inflasi	Persen	2,50 ± 1,00	2,50 ± 1,00
6	Rasio Gini	Indeks	0,190	0,190
7	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,63	6,63
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,40	3,40
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	63,63	63,60
10	Prevalensi Stunting pada Balita	Persen	23,60	23,60
11	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,03	8,40
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	12,90
13	Pengeluaran Riil per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu/ orang/ tahun	7.450	7.550
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,58	76,58

Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, target RKPD Tahun 2026, dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan Semester I Tahun 2026.

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2026	Perubahan Target 2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	64,08	64,00
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,03	8,40
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,90	12,90
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	63,63	63,60
5	Indeks Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Persen	46,00	45,00

6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/Kategori	C	C
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai/Kategori	CC	CC
8	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP
9	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	62,55	62,00
10	Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar	Persen	77,39	75,00
11	Indeks Infrastruktur Perumahan	Persen	71,30	70,50
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,58	76,58
13	Capaian Kesesuaian Pemanfaatan Lahan	Persen	91,50	91,00
14	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,20	6,00

Tabel 6.3 Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026

Sumber: Cetak Perubahan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 dan RKPD BAB 5

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)	
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
			PERANGKAT DAERAH: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	-	1
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	2224/14	2224/14
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	4	4
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	23	40
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1	1
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase anak usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah (APS)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	2
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	2	2
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	50	50
					Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	-	89
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	267	267
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	6	6

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
2	22				Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	6
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	30	30
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	6	6
					Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	-	45
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	43	43
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	129	129
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	2
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	-	150
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	127	127
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	8	8
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	50	50
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	10	10
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
			PERANGKAT DAERAH: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Objek	2	2
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	Benda	-	-	-
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
			PERANGKAT DAERAH: DINAS KESEHATAN					
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA URUSAN DAERAH	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	0
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN -	Orang bulan	600	600
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	Dokumen	306	0
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
1	02	02			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	50
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11	11
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100	100
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13	13
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	11
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	-	0

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	100
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	50	50
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	100
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	100	100
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	50	50
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	50	50
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	3	3
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	5	5
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	12	12
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	5	5
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	12	12
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	12	12
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	3	3
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	30	30

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	1
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	1	1
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	97	97
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	2	2
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	7	7
PERANGKAT DAERAH: RSUD BOBONG								
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	2

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu (AKI)	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	-	1	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	1	2	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	12	12	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	-	1	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	4	
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
			PERANGKAT DAERAH: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	1
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1	1
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	1	1
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	27	27
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4	4
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	0
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -	Laporan	12	12
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit	0	0

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	1
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	29
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	7	2
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara -	Unit	41	41
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit	2	2
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	2
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan permukiman rawan banjir	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0.5	1.25
					Panjang Breakwater yang Dibangun	KM	0	0
					Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	0.23	0.22
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	0	0

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah hujan lintas kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	1	2
					Air Minum (SPAM) Jaringan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	0	0
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun -	Dokumen	0	0
					Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Unit	0	0
					Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Ton/hari	0	0
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (Air limbah domestik layak dan aman)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit	1	1
					Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga	0	0
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	0	0
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	80	96
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	1	1
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	0	0

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	1	1
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung kondisi baik	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	0	1
					Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	9
					Bangunan Gedung (PBG),	-	-	-
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	5	4
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	10	10
					Jalan Kewenangan Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM	466	466
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM	2.24	6.3
					Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	2	10
					Panjang jembatan yang dibangun	Meter	44	60
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota Penetapan RDTR Penetapan RTRW Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	Dokumen	0	0
					Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	1	0

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)	
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	2	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	0	0	
					Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	2	
					Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus	2	2	
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	1	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
			PERANGKAT DAERAH: DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						
1	04	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	14	0
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	1
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25	25
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	4	4
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	23	23

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1
1	04	02	PROGRAM PERUMAHAN	PENGEMBANGAN Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan	1	0
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan	3	3
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Dokumen	2	2
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	1	0
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	4	4

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	3	3
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	1	1
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	1	0
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1	1
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
			PERANGKAT DAERAH: DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN					
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
					Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan	1	1
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
			PERANGKAT DAERAH: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan Paket	12	12
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan -	Bulan Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan -	Laporan	12	12
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya -	Unit	13	13
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	-	13

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	12	12
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	12	12
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	-	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Ke lurahan	12	12
PERANGKAT DAERAH: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH								
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bul an	0	0

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	30	30
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	30
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -	Laporan	12	12
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	2
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan -	Unit	5	5
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	70	70
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun -	Dokumen	0	0
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	0	0
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	50	50
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang	3	3
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	0	0
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun -	Dokumen	1	1
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana -	Orang	10	20

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)	
					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis -	Orang	0	0	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana -	Orang	25	25	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia -	Dokumen	1	1	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan -	Kegiatan	12	12	
					Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan	1	1	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
			PERANGKAT DAERAH: DINAS SOSIAL						
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD -	Laporan	1	1
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	Dokumen	2	2
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pekerja sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di dalam panti rehabilitasi sosial	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	95	0
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlarut yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang Paket Orang	150	150
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	20

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)	
					Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	10	
					Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang Paket Orang	150	150	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	50	
					Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	0	-	50	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	71	71	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	-	75	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Tingkat Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	-	71	
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
			PERANGKAT DAERAH: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK						
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	-	1
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	19
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	kali dokumen	1	1
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan pelayanan	Tingkat Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kota	ORANG Orang	15	15
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	15	8
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang orang	15	15
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	kelompok Lembaga	8	8
					Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	KELUARGA Orang	17	17

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat pemanfaatan data gender da anak dalam perencanaan, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	tahun Dokumen	1	1
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	kali Dokumen	1	1
					Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	forum Lembaga	2	2
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	kecamatan Orang	8	8
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	20	0
					Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	15	15
					Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	kasus Orang	20	20
					Tingkat Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	20	0
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
			PERANGKAT DAERAH: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK					
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan	1	1
					Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0	2	2
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12	12
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	12
					Program Bangsa Kencana	-	-	-
					Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2	2
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	2	2
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	71	71
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	6	6
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	12	12

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	2	2
					Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	5	5
					Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung	5	5
					Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan	15%	15%
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	4	4
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	1	1
					Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok	1	1
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	12	12
					Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	2000	2000

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)	
			PERANGKAT DAERAH: DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	75	75
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Laporan	1	1
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	5
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -	Laporan	10	10
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Persentase Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan	Unit	-	0
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	8	3
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	25	25
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	100	100
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	-	44
					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	2	1
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan -	Ton	1800	1800
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
			PERANGKAT DAERAH: DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase kinerja penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1

Kode			Program	Indikator Kinerja Program	Metadata	Satuan	Target Kinerja 2026 (Sebelum)	Perubahan Target 2026 (Sesudah)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	7
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	4
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD -	Laporan	3	3
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Indeks Pelayanan Publik.	Unit	-	0
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan -	Laporan	2	2
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	72	72
					Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	1	1